

## Informasi tentang pengoperasian sistem pelaporan pelanggaran internal

### 1. Pembukaan

WHC Ltd. (kantor terdaftar: 8912 Nagypáli, cad. 035/2.; nomor registrasi perusahaan: 20-09-067382; nomor pajak: 13773160-2-20; "Perusahaan") sesuai dengan Undang-Undang XXV Tahun 2023 tentang Pengaduan, Pemberitahuan Kepentingan Umum dan Aturan Pelaporan Pelanggaran ("**UU Pengaduan**") No. § ("**Sistem Pelaporan Pelanggaran**"; laporan pelaporan pelanggaran yang dibuat ke Sistem Pelaporan Pelanggaran: "**Laporan**"; orang yang membuat Laporan ke Sistem Pelaporan Pelanggaran: "**Pihak Pelapor**").

### 2. Apa saja yang bisa dilaporkan dalam Sistem Pelaporan?

- 2.1. Informasi mengenai tindakan atau kelalaian ilegal atau dugaan tindakan ilegal, atau penyalahgunaan lainnya, dapat dilaporkan ke Sistem Pelaporan.
- 2.2. Jika Perusahaan menetapkan aturan perilaku bagi karyawannya yang melindungi kepentingan umum atau mengesampingkan kepentingan pribadi, maka pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dilaporkan dalam Sistem Pelaporan.

### 3. Siapa yang dapat mengajukan Laporan pada Sistem Pelaporan?

3.1. Orang-orang berikut ini berhak membuat Laporan dalam Sistem Pelaporan:

- ✓ orang yang dipekerjakan oleh Perusahaan (termasuk, namun tidak terbatas pada, karyawan yang dipinjamkan kepada Perusahaan),
- ✓ pegawai/karyawan yang berhenti bekerja di Perusahaan, dan
- ✓ orang yang ingin menjalin hubungan kerja dengan Perusahaan dan untuk siapa prosedur pembentukan hubungan tersebut telah dimulai.
- ✓ Pedagang tunggal, yaitu perusahaan perseorangan yang/di mana:
  - mempunyai hubungan kontrak dengan Perusahaan, atau
  - prosedur untuk menjalin hubungan tersebut telah dimulai, atau
  - hubungan dengan Perusahaan tersebut telah berakhir.
- ✓ Orang yang memegang kepentingan ekuitas dan anggota badan administratif, manajemen atau pengawasan Perusahaan, termasuk direktur non-eksekutif, yang:
  - Perseroan mempunyai hubungan hukum, atau
  - prosedur untuk menjalin hubungan tersebut telah dimulai, atau
  - hubungan hukum dengan Perseroan tersebut telah berakhir.
- ✓ Orang yang berada di bawah pengawasan dan kendali kontraktor, subkontraktor, pemasok atau agen yang:
  - mempunyai hubungan kontrak dengan Perusahaan, atau
  - prosedur untuk menjalin hubungan tersebut telah dimulai, atau
  - hubungan dengan Penggugat tersebut telah berakhir.
- ✓ Peserta pelatihan dan sukarelawan yang:
  - mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan, atau
  - prosedur untuk menjalin hubungan tersebut telah dimulai, atau
  - hubungan hukum tersebut dengan Perseroan telah berakhir.

### 4. . Bagaimana cara melakukan pelaporan?

4.1. Perseroan telah menunjuk Dr. Beáta Kalocsay, seorang pengacara perlindungan pelapor ("*Pengacara Perlindungan Pelapor*") untuk menangani penerimaan dan penanganan Laporan.

4.2. Pengacara perlindungan pelapor akan menerima laporan dengan cara sebagai berikut:

✓ **Secara elektronik dengan menggunakan formulir pelaporan penyalahgunaan ("*Formulir*") yang tersedia di bagian "Laporkan Penyalahgunaan" di [www.whc.hu](http://www.whc.hu);**

Hanya pengacara perlindungan pelapor yang mempunyai akses terhadap data yang disampaikan dalam Formulir.

✓ **Melalui pos ke "Dr. Kalocsay Beáta ügyvéd részére" 9022 Győr, Bisinger sétány 2. II/2;**

✓ **Setelah janji temu sebelumnya, di alamat berikut: 9022 Győr, Bisinger sétány 2. II/2.**

Janji temu dapat dibuat melalui email di [bejelentes@kalocsaylegal.hu](mailto:bejelentes@kalocsaylegal.hu) atau melalui telepon pada hari Rabu antara pukul 10-13 di +36204101162.

## 5. Aturan yang mengatur penerimaan laporan

5.1. Pengacara perlindungan pelapor harus mengambil langkah-langkah berikut sehubungan dengan laporan pelapor yang dibuat secara lisan dan langsung

✓ Mencatat atau merekam dalam bentuk yang tahan lama dan dapat diambil kembali setelah diinformasikan sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi, atau

✓ secara tertulis dan tergantung pada kemungkinan verifikasi, koreksi dan penerimaan dengan tanda tangan, memberikan salinannya kepada Pelapor/Pelapor. Pengacara perlindungan pelapor harus menyimpan catatan tertulis yang akurat.

5.2. Dalam hal laporan lisan, pengacara perlindungan pelapor harus menarik perhatian pelapor mengenai konsekuensi membuat laporan dengan itikad buruk, aturan prosedur untuk menyelidiki laporan tersebut dan fakta bahwa identitasnya akan dirahasiakan di semua tahap. dari penyelidikan.

5.3. Pengacara Perlindungan Pelapor harus mengirimkan pengakuan atas penyampaian pengaduan tertulis (melalui pos atau dengan menggunakan Formulir) kepada Pelapor dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya pengaduan tertulis yang disampaikan dalam Sistem Pelaporan, dan harus memberikan informasi umum kepada Pelapor tentang aturan prosedural dan pengelolaan data berdasarkan Undang-Undang Pengaduan.

## 6. Penerusan Laporan kepada Perusahaan

6.1. Pengacara Perlindungan Pelapor akan mengirimkan kepada Perusahaan cuplikan Laporan yang tidak berisi data yang memungkinkan identifikasi Pelapor/Pihak Pelapor, kecuali Pelapor telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya atas pengalihan data pribadinya.

## 7. Investigasi laporan

7.1. Perseorangan atau badan hukum yang bersangkutan dengan Laporan akan diberitahu secara rinci tentang Laporan dan aturan pemrosesan data pribadi mereka pada awal penyelidikan. Orang yang bersangkutan dengan Laporan dapat mengungkapkan pandangannya mengenai Laporan melalui perwakilan hukum dan memberikan bukti yang mendukung pandangan tersebut. Informasi berdasarkan poin ini dapat diberikan pada tahap berikutnya jika terdapat alasan yang wajar dimana informasi yang mendesak akan menggagalkan penyelidikan.

7.2. Batas waktu penyidikan suatu Laporan tidak boleh lebih dari 30 hari sejak tanggal diterimanya Laporan - batas waktu tersebut dapat diperpanjang dalam kasus-kasus tertentu yang dibenarkan, dengan informasi secara simultan kepada Pelapor. Pelapor kemudian akan diberitahu mengenai perkiraan tanggal investigasi

dan alasan perpanjangannya. Dalam hal ini batas waktu pemeriksaan Laporan tidak boleh lebih dari tiga bulan.

- 7.3. Selama investigasi, pengacara Perlindungan Pelapor akan tetap berhubungan dengan Pelapor, dan dapat mengundang Pelapor untuk melengkapi atau mengklarifikasi laporan, mengklarifikasi fakta kasus, dan memberikan informasi tambahan.
- 7.4. Pengacara perlindungan pelapor wajib memberitahukan secara tertulis kepada pelapor mengenai penyelidikan atau non-penyelidikan atas laporan tersebut dan alasan-alasan tidak dilakukannya penyelidikan, hasil penyelidikan atas laporan tersebut, dan tindakan yang diambil atau direncanakan..

## 8. Kapan penyidikan suatu Laporan dapat dikesampingkan?

8.1. Investigasi suatu Laporan dapat dikesampingkan dalam kasus-kasus berikut:

- ✓ Laporan dibuat oleh Pelapor yang tidak diketahui identitasnya;
- ✓ Laporan tidak dibuat oleh orang yang memiliki hak untuk membuat,
- ✓ Laporan yang diulang oleh Pelapor yang sama dengan isi Laporan sebelumnya, atau
- ✓ kerugian terhadap kepentingan umum atau kepentingan pribadi yang lebih utama tidak akan sebanding dengan pembatasan hak-hak orang yang bersangkutan akibat penyelidikan Laporan.

## 9. Aturan pelaporan yang beritikad buruk

9.1. Jika ternyata Pelapor telah menyampaikan informasi palsu dengan itikad buruk dan

- ✓ apabila terdapat indikasi telah dilakukan tindak pidana atau penyimpangan, data pribadi harus diserahkan kepada pihak yang berwenang atau penanggung jawab prosedur,
- ✓ ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa dia telah menyebabkan kerusakan yang tidak sah atau kerugian hukum lainnya pada orang lain, data pribadinya harus diungkapkan atas permintaan badan atau orang yang berhak memulai atau melakukan proses hukum.

### Pemberitahuan privasi

WHC Ltd. (kantor terdaftar: 8912 Nagypáli, nomor kadaster 035/2.; "**Perusahaan**"), sebagai pengontrol data, memproses data pribadi sehubungan dengan laporan yang diterima dalam sistem pelaporan penyalahgunaan internal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa 2016/679 (selanjutnya disebut "**GDPR**").

<b>Tujuan pemrosesan:</b>	Menyelidiki laporan yang diterima oleh sistem pelaporan pelanggaran internal dan perbaiki atau hentikan perilaku yang menjadi subjek laporan
<b>Pemangku kepentingan:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pihak Pelapor,</li> <li>✓ orang yang tindakan atau kelalaiannya menimbulkan laporan,</li> <li>✓ orang yang mungkin mempunyai informasi material tentang hal-hal yang terkandung dalam Laporan</li> </ul>
<b>Cakupan data pribadi yang diproses:</b>	Fakta laporan, data pribadi penting untuk penyelidikan laporan
<b>Dasar hukum pemrosesan:</b>	Kepatuhan terhadap kewajiban hukum (Pasal 6 (1) c GDPR) Perusahaan wajib menyelidiki laporan berdasarkan Undang-Undang XXV Tahun 2023.
<b>Durasi pemrosesan:</b>	Data pribadi yang tidak diperlukan untuk penyelidikan akan dihapus oleh Perusahaan tanpa penundaan. Perusahaan akan menghapus data pribadi dari berkas investigasi tanpa penundaan yang tidak semestinya setelah investigasi selesai, namun dalam waktu selambat-

	<p>lambatnya 60 hari, jika tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil berdasarkan investigasi tersebut.</p> <p>If action is taken following the investigation of the Report, including legal proceedings or disciplinary action against the Reporting Party, the Company will keep the data relating to the Report until the final conclusion of the proceedings initiated on the basis of the Report.</p>
<b>Kepada siapa surat ini ditujukan:</b>	<p>Hanya orang-orang yang aksesnya sangat diperlukan untuk penyelidikan dan pemrosesan Laporan yang dapat memiliki akses ke data pribadi yang diproses oleh Perusahaan sehubungan dengan Laporan.</p> <p>Kecuali dalam hal laporan dengan itikad buruk, data pribadi Pihak Pelapor hanya dapat diungkapkan kepada badan yang berwenang untuk melakukan proses yang dimulai berdasarkan laporan tersebut, jika badan tersebut berhak mengolah data tersebut menurut hukum atau jika Pihak Pelapor telah menyetujui pengungkapan data tersebut.</p>
<b>Pemroses data:</b>	<p>WHC Holding Kft. (Kantor terdaftar: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 2.)</p> <p>Netrix Informatikai Kft. (Kantor terdaftar: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 12 fe. 2., nomor registrasi perusahaan: 01-09- 706619)</p> <p>Microsoft Corporation (Microsoft Way. Redmond, WA 98052-7329, AS)</p>
<p><b><i>Berkenaan dengan Laporan, Pengacara Perlindungan Pelapor merupakan pengontrol data terpisah dan Pemberitahuan Privasi tersedia di tautan berikut:</i></b></p> <p><b><i><a href="https://kalocsaylegal.hu/wp-content/uploads/2023/09/Adatvedelem.pdf">https://kalocsaylegal.hu/wp-content/uploads/2023/09/Adatvedelem.pdf</a></i></b></p>	

#### **Hak subjek data:**

Subjek data dapat menggunakan haknya sehubungan dengan pemrosesan yang dilakukan oleh Perusahaan dengan menghubungi:

- melalui pos ke 9024 Győr, Wesselényi u. 8.; atau
- melalui email ke flora.szabo@whc-group.com.

Penanggung Jawab Perlindungan Data: Szabó Flóra

Perusahaan harus memberi tahu subjek data tentang tindakan yang diambil sebagai tanggapan atas permintaan tersebut paling lambat dalam waktu 1 bulan.

**Hak akses:** subjek data dapat meminta informasi dari Perusahaan tentang tujuan dan cara pemrosesan data pribadinya, kepada siapa data tersebut diungkapkan, dan dapat meminta salinan data yang disimpan oleh Perusahaan. *(Dalam melaksanakan hak atas informasi dan akses berdasarkan Undang-Undang Pengaduan, data pribadi subjek data, sebagai subjek data, tidak boleh diungkapkan kepada orang yang meminta informasi tersebut..)*

**Hak untuk melakukan perbaikan:** subjek data dapat meminta Perusahaan untuk mengubah atau menambah data pribadi yang dicatat.

**Hak untuk menghapus:** Subjek data berhak meminta Perusahaan menghapus data pribadi yang berkaitan dengannya jika (i) data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulan atau pemrosesannya; (ii) subjek data menarik persetujuannya dan tidak ada dasar hukum lain untuk pemrosesan tersebut; (iii) subjek data keberatan dengan pemrosesan dan tidak ada alasan sah yang mengesampingkan pemrosesan tersebut; (iv) data telah diproses secara tidak sah; atau (v) data harus dihapus untuk memenuhi kewajiban hukum yang dikenakan pada pengontrol.

**Hak untuk membatasi pemrosesan:** Subjek data dapat meminta agar Perusahaan membatasi pemrosesan data pribadinya (dengan secara jelas menunjukkan sifat terbatas dari pemrosesan tersebut dan memastikan bahwa data tersebut disimpan terpisah dari data lainnya) jika (i) ia menentang keakuratan data tersebut. data (dalam hal ini pembatasan berlaku untuk jangka waktu di mana Perusahaan memverifikasi keakuratan data); (ii) pemrosesannya melanggar hukum dan subjek data menentang penghapusan data dan malah meminta pembatasan penggunaannya; (iii) Perusahaan tidak lagi memerlukan data tersebut untuk tujuan pemrosesan, namun subjek data memerlukan data tersebut untuk pembuatan, pelaksanaan, atau pembelaan tuntutan hukum; atau (iv) subjek data telah menolak pemrosesan tersebut (dalam hal ini pembatasan berlaku untuk jangka waktu tertentu hingga diketahui apakah alasan sah Perusahaan mengesampingkan alasan sah subjek data).

**Hak untuk menolak:** subjek data mempunyai hak untuk menolak kapan saja, atas dasar situasi khusus yang dialaminya, terhadap pemrosesan data pribadinya yang diperlukan untuk tujuan kepentingan sah yang dilakukan oleh Perusahaan atau pihak ketiga. Dalam kasus tersebut, pengontrol tidak dapat lagi memproses data, kecuali Perusahaan membuktikan bahwa pemrosesan tersebut dibenarkan oleh alasan sah yang memaksa yang mengesampingkan kepentingan, hak, dan kebebasan subjek data atau terkait dengan penetapan, pelaksanaan, atau pembelaan klaim hukum..

**Hak untuk mendapatkan ganti rugi:** Jika subjek data menganggap bahwa Perusahaan telah melanggar undang-undang perlindungan data yang berlaku, dia dapat menghubungi Perusahaan menggunakan rincian kontak yang disediakan dalam pemberitahuan ini, dan juga dapat mengajukan keluhan kepada Otoritas Nasional untuk Perlindungan Data dan Kebebasan Informasi ( alamat: 1055 Budapest, Falk Miksa u.9-11, alamat pos: 1363 Budapest, Pf.9.; alamat email: [ugyfelszolgalat@naih.hu](mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu)).Subjek data juga berhak meminta ganti rugi hukum di pengadilan, dalam hal ini subjek data dapat memilih untuk membawa permasalahan tersebut ke pengadilan di tempat tinggal, domisili, atau domisili Perusahaan.